

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang analisis kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016. Untuk menghitung kinerja keuangan digunakan rasio keuangan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah. Rasio keuangan daerah dihitung menggunakan rasio efektivitas penerimaan PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian yang terbagi menjadi dua yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Untuk menghitung kemampuan keuangan digunakan pengukuran pertumbuhan *share and growth*, dan peta kemampuan keuangan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio efektivitas PAD tertinggi di kabupaten/kota di Sumatera Barat selama tahun 2012-2016 adalah Kabupaten Pasaman dengan rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 127%. Daerah yang mempunyai rasio efektivitas PAD terendah adalah Kabupaten Dharmasraya dengan rata-rata sebesar 84%. Daerah yang memiliki rasio efektivitas berimbang adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Rasio efisiensi tertinggi di kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016 adalah Kota Padang Panjang dengan persentase rasio efisiensi sebesar 94%. Tingkat efisiensi terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata rasio sebesar 102%. Daerah yang memiliki rasio efisiensi berimbang adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Rasio keserasian menunjukkan daerah banyak mengalokasikan belanja operasi daripada belanja modalnya. Daerah yang memiliki rata-rata belanja operasi yang terendah selama tahun 2012-2016 adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dengan persentase yaitu sebesar 62%, sedangkan persentase tertinggi pada Kota Bukittinggi dengan persentase sebesar 87%. Kemudian rasio belanja modal, Kabupaten Solok Selatan memiliki rata-rata rasio belanja modal tertinggi yaitu sebesar 30%, dan daerah yang memiliki rata-rata rasio belanja modal terendah adalah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi yang memiliki rasio rata-rata 13%.
4. Rasio kemandirian di kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2012-2016 menunjukkan daerah masih tergolong instruktif, akan tetapi jika dilihat dari persentasenya maka daerah yang memiliki rata-rata tingkat kemandirian paling rendah adalah kabupaten Kabupaten Solok dan Kota Pariaman karena hanya memiliki rasio rata-rata sebesar 5%, sedangkan Kota Padang berada pada tingkat kemandirian paling tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 22%.
5. Pertumbuhan rata-rata *share* tertinggi dimiliki oleh Kota Padang dengan nilai sebesar 17%, daerah yang memiliki rata-rata nilai *share* terendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 5%. Rata-rata nilai *growth* tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai *growth* sebesar 32%, dan daerah yang memiliki nilai *share* terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai sebesar 3%.

6. Peta kemampuan keuangan daerah menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang berada pada kuadran I (kondisi ideal) adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang. Daerah yang berda pada kuadran II (belum ideal) adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan. Daerah yang berada pada kuadran III (belum ideal) adalah Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Sawahlunto. Sedangkan daerah yang berada pada kuadran IV (paling buruk) adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Dhamasraya

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sampel yang digunakan terbatas pada pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Barat saja.
- 2) Rentan waktu yang digunakan dalam penelitian dibatasi menjadi lima tahun sehingga terkesan kurang maksimal dalam melakukan penelitian.
- 3) Untuk mengukur kinerja keuangan hanya menggunakan hanya menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio kemandirian keuangan daerah. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah hanya menggunakan perhitungan *share and growth* dan peta kemampuan keuangan daerah.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dianjurkan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi yang dimiliki kabupaten/kota di Sumatera Barat mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, perdagangan hingga industri kreatif. Apabila pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat juga mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkat. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka bantuan dari pemerintah pusat akan berkurang sehingga nantinya akan membuat daerah mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah lingkup wilayah penelitian, tidak hanya di kabupaten/kota di Sumatera Barat saja. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah sebenarnya.